



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS PANGAN**

Gedung Menara Wijaya Lantai 5  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

Email : [dinaspangansukoharjo@gmail.com](mailto:dinaspangansukoharjo@gmail.com)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 526/89/2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021  
PADA DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan evaluasi internal oleh Inspektorat Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tentang Perubahan Tentang Perubahan Rencana Strategis

- KEDUA : Tahun 2016 – 2021 Pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dokumen penganggaran yaitu Rencana Kerja dan Anggaran, serta sebagai pendukung Evaluasi, atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo pada  
tanggal Oktober 2020

✦ PIt. KEPALA DINAS PANGAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



✦ NETTY HARJANTI





# RENCANA STRATEGIS DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2016 - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**DINAS PANGAN**

2020

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Latar Belakang.....	2
	B. Landasan Hukum.....	2
	C. Maksud dan Tujuan.....	4
	D. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II</b>	<b>TUGAS, POKOK DAN FUNGSI DINAS PANGAN....</b>	
	A. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Pangan.....	7
	B. Sumber Daya Dinas Pangan.....	11
	C. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan.....	14
	D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	30
<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKO FUNGSI.....</b>	
	A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	32
	B. Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.....	33
	C. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Perangkat Provinsi Jawa Tengah.....	52
	D. Telaah RTRW Kabupaten Sukoharjo.....	55
	E. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	57
<b>BAB IV</b>	<b>VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	
	A. Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan.....	58
	B. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pangan	59
	C. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pangan.....	61
	D. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Pangan.....	63
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....</b>	
	A. Program Umum.....	64
	B. Program Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.....	70
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....</b>	75
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Daftar Rincian Pegawai Negeri Sipil Dinas Pangan.....	11
Tabel 2.2.	Sarana/Prasarana Yang Dimiliki/Dikuasai Badan Ketahanan Pangan	12
Tabel 2.3.	Capaian Kinerja Urusan Pangan.....	14
Tabel 2.4.	Kinerja Khusus Ketahanan Pangan.....	15
Tabel 2.5.	Tabel Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	17
Tabel 2.6.	Tabel Analisis Pendanaan Dinas Pangan.....	24
Tabel 3.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran.....	38
Tabel 3.2.	Matrik Program Prioritas Dinas Pangan.....	47
Tabel 3.3.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan Kementerian Pertanian RI.....	47
Tabel 3.4.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	49
Tabel 4.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan.....	60
Tabel 4.2.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	61
Tabel 4.3.	Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	63
Tabel 5.1.	Rencana Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikator dan Kinerja Tahunan dengan Target Renstra....	66
Tabel 5.2.	Rencana Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikator dan Kinerja Tahunan dengan Target Akhir Renstra.....	73
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan.....	75

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 diamanatkan bahwa Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahannya yang diampu sesuai tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun seperti disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka sejak ditetapkan tanggal 7 Oktober 2016, nomenklatur Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo berubah menjadi Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo. Dengan berlakunya peraturan daerah tentang susunan perangkat daerah yang baru tersebut, secara otomatis dokumen-dokumen yang dijadikan acuan dalam melaksanakan tupoksi harus disesuaikan, termasuk dokumen Rencana Strategis.

Perubahan dokumen Rencana Strategis, memperhatikan tugas pokok dan fungsi, serta urusan yang diampu perangkat daerah. Dinas Pangan yang sebelumnya mengampu **urusan wajib pelayanan dasar**, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengampu **urusan wajib non pelayanan dasar** yaitu urusan pangan. Di dalam Revisi Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra SKPD dilaksanakan dengan tetap mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang



Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## **B. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi;
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021.

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pangan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021;
- b. Sabagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Sebagai panduan dan tolok ukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo selama kurun waktu 2016-2021;

#### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pangan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Sukoharjo selama 5



- (lima) tahun ke depan, sehingga mendukung terwujudnya rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan;
- b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2017-2021;
  - c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antara Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat; serta
  - d. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penyusunan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

- BAB I       PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
  - B. Landasan Hukum
  - C. Maksud dan Tujuan
  - D. Sitematika Penulisan
- BAB II       GAMBARAN PELAYANAN
- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
  - B. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- BAB III      ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Daerah
  - B. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - C. Telaahan RTRW
  - D. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB	IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
		A. Visi dan Misi Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
		B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
		C. Strategi dan Kebijakan
BAB	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
		A. Program Umum
		B. Program yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
BAB	VI	INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB	VII	PENUTUP

**BAB II**  
**TUGAS, POKOK DAN FUNGSI**  
**DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

**A. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

1. Tugas, Pokok dan Fungsi

Dinas Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236)

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor : 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, bahwa Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;



- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
- g. pengoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

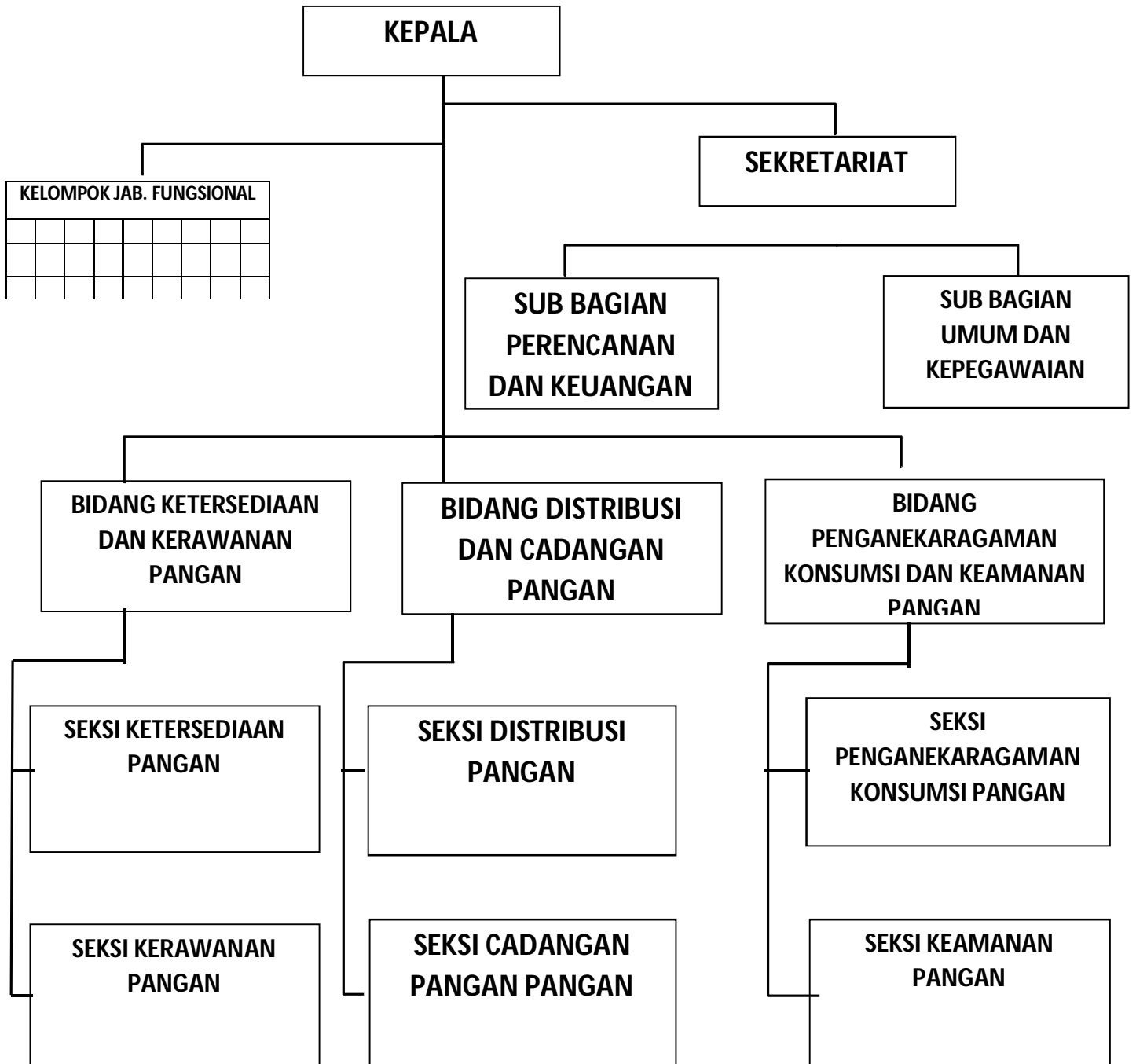
## 2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi sub bagian:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, membawahi seksi :
  - 1) Seksi Ketersediaan Pangan;
  - 2) Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, membawahi seksi :
  - 1) Seksi Distribusi Pangan;

- 2) Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, membawahi:
  - 1) Seksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;
  - 2) Seksi Keamanan Pangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi tersebut dituangkan dalam struktur organisasi sebagai berikut :





## B. Sumber Daya Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

### 1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 27 orang, terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 22 orang
- b. Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 5 orang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III, 7 orang pejabat eselon IV dan 10 orang staf.

Jumlah PNS berdasarkan kepangkatan, golongan dan tingkat pendidikan terinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Daftar Rincian Pegawai Negeri Sipil Dinas Pangan  
Kabupaten Sukoharjo

No.	Pangkat/Gol.	Jml.	Tingkat Pendidikan	Jml.	Riwayat Diklat Struktural	Jml.
1.	Pengatur Muda / IIa	1	SLTA/SMU/SMK	6	Diklatpim IV	11
2.	Pengatur / IIc	3	Sarjana Muda	2	Diklatpim III	2
3.	Pengatur Tk. I / IIId	3	S1	11	Diklatpim II	-
4.	Penata Muda / IIIa	1	S2	4		
5.	Penata Muda Tk. I / IIIb					
6.	Penata / III c	1				
7.	Penata Tk. I / IIIId	9				
8.	Pembina / IV a	3				
9.	Pembina Tk. I / IV b	2				
	Jumlah	23		23		

Dari tabel 2.1. dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, PNS di Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo terbanyak berpendidikan S1 yaitu 11 orang dari total 23 orang. Sedangkan yang telah mengikuti Diklatpim sebanyak 11 orang dari 13 orang pejabat struktural yang ada.

## 2. Sumber Daya Modal

Sumberdaya modal yang merupakan sarana prasarana yang dimiliki/dikuasai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo secara garis besar terinci sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Sarana/Prasarana Yang Dimiliki/Dikuasai Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

No.	Uraian	Jumlah/Luas	Satuan	Keterangan
1.	Tanah/bangunan :			
	a. Tanah/bangunan kantor	600	m2	Hak Pakai
	b. Bangunan gudang cadangan pangan pemerintah (CPP)	216	m2	Hak Pakai
	c. Lumbung Pangan Masyarakat	10/376	Lumbung /m2	Hak Pakai
2.	Alat Angkutan :			
	a. Roda 4	5	Unit	Yang masih layak 2 unit
	b. Roda 3	1	Unit	Layak
	c. Roda 2	22	Unit	Yang masih layak 12 unit
	d. Alat angkutan darat tidak bermotor	1	unit	Layak
3.	Alat-alat kantor dan rumah tangga antara lain :	214	unit	
	Komputer	7	Unit	Yang masih layak 5
	Laptop	9	Unit	
	Printer	6	Unit	Yang masih layak 4
	Mesin ketik manual	4	Buah	
	LCD	1	Buah	
	AC split	4	Buah	
	Kipas Angin	4	Buah	Rusak
	Lemari Es	2	Buah	
	Kamera digital	2	Buah	Rusak 1
	Meja, kursi, rak,almari, dll	175	Buah	
4.	Alat-alat Studio dan komunikasi	7	Unit	
5.	Buku-buku perpustakaan	13	Buah	

Kendaraan operasional roda 4 yang dimiliki Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo berjumlah 5 unit. Dari 5 unit tersebut, berdasarkan catatan aset,

2 unit merupakan pembelian tahun 1996. Dua unit pembelian tahun 2003 dan satu unit lainnya pembelian tahun 2013. Dibandingkan dengan jumlah pejabat eselon II dan III yang ada, maka rasio kendaraan dinas roda 4 yang masih layak yaitu 3 : 4.

Kendaraan operasional roda 2, dari 22 unit, 10 unit pembelian antara tahun 1991 – 1999. Tiga unit pembelian tahun 2004 dan 2005, 9 unit pembelian tahun 2015. Dari jumlah total 22 unit tersebut, yang masih dimanfaatkan sebanyak 16 unit. Dari total 16 unit kendaraan roda 2 yang masih bisa dimanfaatkan, 8 unit merupakan operasional untuk pejabat eselon IV dengan rasio 1 : 1. Sedangkan 8 unit dimanfaatkan untuk operasional sehari-hari (antar surat, belanja kantor, operasional staf ke daerah, dll).

Kendaraan roda tiga sebanyak 1 unit digunakan untuk operasional Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

Komputer dan laptop yang dimiliki Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo sebanyak 16 unit yang masih layak berjumlah 14 unit. Dibandingkan dengan jumlah PNS yang menggunakan peralatan tersebut sebanyak 19 PNS, maka rasionya adalah 14 : 19 (0,7). Rasio antara printer dengan komputer dan laptop sebesar 4 : 14 (2 : 7).

### **C. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.



Kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan periode RPJMD Tahun 2010 – 2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2010-2015**

No.	URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Ketersediaan pangan (beras dll)	Ton	207.306	189.182	208.471	230.518	226.222	253.092	205.087
2	Konsumsi pangan (beras dll)	Ton	88.343	148.854	80.794	104.518	112.205	135.639	92.388
3	Desa Rawan Pangan	Desa	41	40	39	39	35	35	38
4	Pola konsumsi pangan masyarakat	k.kal/kap/hari	1.459,2	1.908,5	1.924,3	1.960,8	2.039,8	2.027	2.142
5	Terbentuknya lembaga distribusi pangan masyarakat	lembaga	1	1	1	-	-	1	5
6	Pola pangan harapan	%	83,8	86,50	87,10	89,00	91,60	91,70	95

Dari tabel 2.3 dapat diketahui bahwa Kinerja yang belum tercapai antara lain : Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dan Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum memenuhi target. Dari target 95 di akhir tahun 2015 baru tercapai 91,7, karena tingkat keragaman konsumsi dan mutu produk pangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Konsumsi pangan masyarakat masih tergantung pada beras sehingga konsumsi protein hewani, sayuran dan buah-buahan serta umbi-umbian masih rendah.

Pola Konsumsi Pangan Masyarakat belum memenuhi target, baru tercapai 94,63 %, ini disebabkan karena jumlah kalori dalam pangan yang dikonsumsi masyarakat masih rendah terutama yang bersumber dari pangan hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) belum memenuhi target. Dari 5 LDPM yang ditargetkan baru terealisasi 3 LDPM, karena tidak ada gapoktan yang memenuhi persyaratan teknis untuk diberikan penguatan LDPM, yaitu gapoktan harus mempunyai tanah bersertifikat atas nama gapoktan.

Disamping kinerja utama yang dicapai selama periode Tahun 2010 – 2015, berikut adalah kinerja yang dicapai pada periode Renstra 2010 – 2015 yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan :

**Tabel 2.4**  
**Kinerja Khusus Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir Renstra	% Capaian
1.	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	183,24	160,61	207,58	103,154	132,06	90	146
2.	Penguatan Cadangan Pangan	-	-	-	-	-	60	-
3.	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	66,67	66,67	83,33	84,57	84,57	90	93,97
4.	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	93,52	97,84	80,76	89,94	83,07	90	92,30
5.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	-	-	42,86	60,00	85,71	80	107,14

Pada Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) indikator yang ditargetkan indikator yang capaiannya masih rendah, yaitu indikator Penguatan Cadangan Pangan.

Pada indikator Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten masih nol. Kabupaten Sukoharjo baru membangun gudang untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2015 dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2016 dilaksanakan penyusunan Raperda untuk pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten. Pada Tahun 2017 direncanakan pengisian Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten tersebut.

1. Analisis Kinerja Renstra 2010 - 2015

Kinerja pelayanan Dinas Pangan pada periode Renstra 2010 – 2015 tercantum pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5  
Tabel Analisis Kinerja Perangkat Daerah pada Renstra 2010 – 2015

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra s/d 2015	Target Renstra Tahunan					Capaian Renstra Tahunan					Rasio Renstra Tahunan				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																		
1.	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	- Terpuhinya kebutuhan jasa surat-menyurat, terjaminnya surat sampai tujuan	2.500 surat 60 bulan	500 surat 12 bulan	500 surat 12 bulan	600 surat 12 bulan	600 surat 12 bulan	600 surat 12 bulan	589 surat 12 bulan	600 surat 12 bulan	924 surat 12 bulan	699 surat 12 bulan	687 surat 12 bulan	24 20	24 20	37 20	28 20	27 20
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terpuhinya kebutuhan jasa komunikasi melalui telepon, kebutuhan air dan listrik untuk kegiatan dinas	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20	20	20	20	20
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terwujudnya kelancaran administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan APBD	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20	20	20	20	20
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Terpuhinya kebutuhan alat tulis kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20	20	20	20	20
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Terpuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20	20	20	20	20
6.	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	- Terpuhinya kebutuhan komponen peralatan listrik dan kebutuhan instalasi komunikasi melalui internet	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20	20	20	20	20
7.	Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga	- Tercukupinya kebutuhan sarana prasarana rumah tangga kantor, jasa tenaga kebersihan kantor/ jaga malam/sopir	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20	20	20	20	20
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Terpuhinya kebutuhan bahan bacaan sebagai bahan informasi	2880 expl 2880 expl 60 bulan	624 expl 624 expl 12 bulan	312 expl 624 expl 12 bulan	312 expl 624 expl 12 bulan	300 expl 300 expl 12 bulan	300 expl 300 expl 12 bulan	645 expl 650 expl 12 bulan	305 expl 611 expl 12 bulan	295 expl 586 expl 12 bulan	294 expl 293 expl 12 bulan	288 expl 288 expl 12 bulan	22 23 20	11 21 20	10 20 20	10 10 20	10 10 20

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra s/d 2015	Target Renstra Tahunan					Capaian Renstra Tahunan					Rasio Renstra Tahunan				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman bagi aparatur, tamu dinas, dan rapat dinas	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20	20	20	20	20
10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	- Terpenuhiya undangan rapat-rapat koordinasi dan kebutuhan konsultasi ke luar daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20	20	20	20	20
<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																		
11.	Pengadaan Kendaraan Dinas	- Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan 2	15 unit	- unit	- unit	1 unit	- unit	9 unit	- unit	- unit	1 unit	- unit	9 unit	-	-	7	-	60
12.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor yang layak (Laptop, PC, Printer, Mesin Tik Manual, Card Reader, kamera digital, LCD Proyektor)	28 unit	5 unit	6 unit	2 unit	6 unit	2 unit	5 unit	6 unit	1 unit	5 unit	2 unit	18	21	4	18	7
13.	Pengadaan Mebeleur	- Terpenuhiya kebutuhan mebeleur kantor yang layak pakai (Meja kerja eselon, rak arsip, meja kursi tamu, kursi rapat)	43 unit	- unit	4 unit	5 unit	32 unit	- unit	- unit	4 unit	5 unit	15 unit	- unit	-	9	12	35	-
14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	20	20	20	20	20
15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	- Terwujudnya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	17 unit	16 unit	16 unit	17 unit	17 unit	17 unit	16 unit	16 unit	17 unit	17 unit	17 unit	94	94	100	100	100
			60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20	20	20	20	20



No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra s/d 2015	Target Renstra Tahunan					Capaian Renstra Tahunan					Rasio Renstra Tahunan				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Terpeliharanya perlengkapan kantor : (AC, komputer, printer, mesin tik)	60 bulan 7 unit 60 bulan	12 bulan 7 unit 12 bulan	12 bulan 7 unit 12 bulan	12 bulan 7 unit 12 bulan	12 bulan 7 unit 12 bulan	12 bulan 8 unit 12 bulan	12 bulan 7 unit 12 bulan	12 bulan 7 unit 12 bulan	12 bulan 7 unit 12 bulan	12 bulan 7 unit 12 bulan	12 bulan 8 unit 12 bulan	20 100 20	20 100 20	20 100 20	20 100 20	20 114 20
<b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																		
17.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	- Terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapannya	125 stel	- stel	25 stel	25 stel	25 stel	25 stel	- stel	25 stel	25 stel	25 stel	25 stel	0	20	20	20	20
<b>IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																		
18.	Study Banding	- Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur melalui pelaksanaan study banding	5 kali 5 orang	1 kali 1 orang	1 kali 1 orang	2 kali 2 orang	1 kali 1 orang	1 kali 1 orang	1 kali 1 orang	1 kali 1 orang	1 kali 1 orang	1 kali 1 orang	1 kali 1 orang	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
19.	Seminar/Lokakarya	- Tersedianya SDM yang mampu dan trampil dalam bidang ketahanan pangan melalui pengiriman peserta lokakarya/ seminar	5 kali 5 orang	3 kali 3 orang	3 kali 3 orang	1 kali 1 orang	2 kali 2 orang	1 kali 1 orang	1 kali 1 orang	1 kali 1 orang	1 kali 1 orang	2 kali 2 orang	1 kali 1 orang	20 20	20 20	20 20	40 40	20 20
<b>V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																		
20.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terwujudnya laporan capaian kinerja SKPD	10 dok.	- dok.	1 dok.	3 dok.	3 dok.	4 dok.	- dok.	1 dok.	3 dok.	3 dok.	4 dok.	0	10	30	30	40
21.	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	- Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka terwujudnya dokumen prognosis realisasi anggaran	10 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.	20	20	20	20	20
22.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	- Terwujudnya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 2013	25 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	20	20	20	20	20

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra s/d 2015	Target Renstra Tahunan					Capaian Renstra Tahunan					Rasio Renstra Tahunan				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>VI. Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>																		
23	Penyelenggaraan Forum SKPD	- Tersusunnya dokumen penjangkangan aspirasi	5 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	20	20	20	20	20
24	Penyusunan Dokumen Perencanaan	- Tercukupinya kebutuhan informasi dalam hal perencanaan program/ kegiatan ketahanan pangan	15 dok.	4 dok.	3 dok.	5 dok.	5 dok.	6 dok.	4 dok.	3 dok.	5 dok.	5 dok.	6 dok.	27	20	33	33	40

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahunan					Capaian Renstra Tahunan					Rasio Renstra Tahunan					
			Target Renstra	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
			s/d 2015															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>																	
1.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	- Terwujudnya peta kerawanan pangan	12 kec. 5 dok.	12 kec. 1 dok.	12 kec. 1 dok.	12 kec. 1 dok.	12 kec. 1 dok.	12 kec. 1 dok.	kec. dok.	12 kec. 1 dok.	12 kec. 1 dok.	12 kec. 1 dok.	12 kec. 1 dok.	100 20	100 20	100 20	100 20	100 20
2.	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan	- Tersedianya data base sebagai bahan penyusunan kebijakan ketahanan pangan	5 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	20	20	20	20	20
3.	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	- Tersusunnya pola konsumsi pangan	5 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	20	20	20	20	20
4.	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	- Terwujudnya laporan berkala ketahanan pangan daerah	5 dok.	- dok.	1 dok.	2 dok.	- dok.	- dok.	1 dok.	1 dok.	2 dok.	- dok.	- dok.	-	20	40	-	-
5.	Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	- Tersusunnya dokumen distribusi (rantai pasokan) dan pemasaran pangan	60 bulan 5 dok.	- bulan - dok.	- bulan - dok.	12 bulan 1 dok.	12 bulan 1 dok.	12 bulan 1 dok.	bulan dok.	- bulan - dok.	12 bulan 1 dok.	12 bulan 1 dok.	12 bulan 1 dok.	- -	- -	20 20	20 20	20 20
6.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan	- Tersusunnya dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan kebijakan perberasan	5 dok.	- dok.	- dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	- dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	-	-	20	20	20
7.	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan	- Terwujudnya percontohan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	1 unit 2 kelompok	- unit	- unit	- unit	1 unit	1 unit	unit	- unit	- unit	1 unit	1 unit	-	-	-	100	100
		- Terbentuknya kawasan rumah pangan lestari	2 kelp.	-	-	-	-	2 kelp.	-	-	-	2 kelp.	-	-	-	-	-	100
		- Terwujudnya kepastian hukum	100 %					100 %					100 %					100
8.	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	- Terwujudnya data analisis akses pangan masyarakat	5 dok.	- dok.	- dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	- dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	-	-	20	20	20
9.	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	- Tersusunnya dokumen pemantauan dan analisis harga pangan pokok	5 dok.	- dok.	- dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	- dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	-	-	20	20	20

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra s/d 2015	Target Renstra Tahunan					Capaian Renstra Tahunan					Rasio Renstra Tahunan				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
10.	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	- Terwujudnya penganeekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman serta terciptanya berbagai macam makanan olahan berbasis sumber daya lokal	38 kali	2 kali	2 kali	14 kali	12 kali	12 kali	2 kali	2 kali	14 kali	12 kali	12 kali	5	5	37	32	32
11.	Pengembangan Cadangan Pangan daerah	- Terwujudnya koordinasi, monitoring dan pelaporan dalam pengembangan cadangan pangan daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20	20	20	20	20
12.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	- Terwujudnya pengembangan desa mandiri pangan	16 kelompok	8 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	19 kelp.	19 kelp.	8 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	19 kelp.	19 kelp.	50	25	25	119	119
13.	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	- Terwujudnya pemberdayaan lumbung pangan masyarakat	4 desa/ 2 lumbung	2 desa -	1 desa -	1 desa -	13 desa -	13 desa -	2 desa -	1 desa -	1 desa -	13 desa -	13 desa 2 lumbung	50 -	25 -	25 -	325 -	325 100
14.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	- Terwujudnya peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan	30 sekolah/ kel. tani	6 sekolah/ kel. tani	- sekolah/ kel. tani	10 sekolah/ kel. tani	10 sekolah/ kel. tani	12 kec. 10 sekolah	6 sekolah/ kel. tani	- sekolah/ kel. tani	10 sekolah/ kel. tani	10 sekolah/ kel. ta	12 kec. 10 sekolah	20	-	33	33	40
15.	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	- Terwujudnya peningkatan pengetahuan tentang sumber pangan alternatif	15 desa/ kelp.	3 desa/ kelp.	7 desa/ kelp.	2 desa/ kelp.	2 desa/ kelp.	2 kelp.	3 desa/ kelp.	7 desa/ kelp.	2 desa/ kelp.	2 desa/ kelp.	2 kelp.	20	47	13	13	13
16.	Penyelenggaraan DAK Bidang Pertanian	- Terwujudnya gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten beserta sarana pendukungnya	1 unit	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	100
<b>VIII Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian</b>																		
16.	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	- Terwujudnya promosi/pameran hasil pertanian (arti luas) dengan melakukan penyebaran informasi melalui pameran/expo	10 kali	2 kali	2 kali	2 kali	5 kali	4 kali	2 kali	2 kali	2 kali	5 kali	4 kali	20	20	20	50	40





2. Analisis Pendanaan Renstra 2010 - 2015

Realisasi pendanaan Program dan Kegiatan Renstra periode Tahun 2010 – 2015 dalam upaya mencapai sasaran selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Tabel Analisis Pendanaan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo pada Renstra 2010 – 2015

No.	Program / Kegiatan	Target Anggaran Tahunan (000)					Realisasi Anggaran Tahunan (000)					Rasio Pendanaan Renstra Tahunan					Rasio Rata-rata Pertumbuhan Pendanaan (000)	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																	
1.	Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	5.000	5.500	5.461	5.500	5.000	4.135	5.500	5.407	4.920	4.215	82,70	99,99	99,01	89,46	84,30	5.292	4.835
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.100	18.000	22.380	31.420	26.463	8.250	14.938	15.390	23.964	21.617	74,32	82,99	68,77	76,27	81,69	21.873	16.832
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	33.000	37.200	43.200	43.200	44.800	33.000	33.600	43.200	43.200	44.669	100,00	90,32	100,00	100,00	99,71	40.280	39.534
4.	Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga	17.460	21.600	43.100	62.645	50.000	17.425	19.348	41.160	56.572	48.600	99,80	89,57	95,50	90,31	97,20	38.961	36.621
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000	17.000	21.000	22.000	16.500	15.000	17.000	21.000	22.000	16.500	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	18.300	18.300
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.032	9.500	10.500	11.000	11.000	9.032	9.500	10.500	11.000	11.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10.206	10.206
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.476	1.900	14.000	2.500	10.000	2.474	1.900	13.234	2.499	9.943	99,92	100,00	94,53	99,96	99,43	6.175	6.010
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.860	3.210	3.210	3.500	3.500	4.595	3.138	3.039	3.416	3.363	94,55	97,74	94,67	97,59	96,09	3.656	3.510
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.600	26.000	23.500	27.000	28.900	22.395	21.784	21.340	22.515	24.910	87,48	83,78	90,81	83,39	86,19	26.200	22.589
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	75.000	65.000	63.835	75.500	64.304	69.614	48.997	41.961	58.656	50.293	92,82	75,38	65,73	77,69	78,21	68.728	53.904

No.	Program / Kegiatan	Target Anggaran Tahunan (000)					Realisasi Anggaran Tahunan (000)					Rasio Pendanaan Renstra Tahunan					Rasio Rata-rata Pertumbuhan Pendanaan (000)	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																		
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	261.500	-	140.200	-	-	260.250	-	139.550	-	-	99,52	-	99,54	200.850	199.900
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	36.000	29.000	16.762	48.500	19.500	33.655	25.876	6.631	36.963	18.975	93,49	89,23	39,56	76,21	97,31	29.952	24.420
3.	Pengadaan Mebelur	-	15.059	9.200	20.840	-	-	14.959	9.000	19.623	-	-	99,34	97,83	94,16	-	15.033	14.527
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000	17.000	50.000	24.620	9.500	29.225	16.860	48.422	23.750	6.802	97,42	99,18	96,84	96,47	71,59	26.224	25.012
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	38.524	56.729	149.820	170.142	125.401	38.422	55.745	124.817	138.946	85.597	99,74	98,26	83,31	81,66	68,26	108.123	88.705
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.000	3.756	5.100	5.100	6.000	3.745	3.755	4.950	5.100	5.850	93,63	99,97	97,06	100,00	97,50	4.791	4.680
<b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																		
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	5.875	5.875	5.875	5.875	-	5.875	5.875	5.875	5.875	-	100,00	100,00	100,00	100,00	5.875	5.875
<b>IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																		
1.	Study Banding	5.104	9.500	23.920	12.000	12.000	5.104	9.500	9.179	4.151	5.519	-	100,00	100,00	100,00	100,00	5.875	5.875
2.	Seminar/Lokakarya	10.000	5.975	3.252	10.518	5.500	3.690	3.501	2.575	8.504	5.045	-	100,00	100,00	100,00	100,00	5.875	5.875
<b>V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																		
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4.500	4.000	4.000	2.000	-	3.829	3.580	3.360	1.999	-	100,00	100,00	100,00	100,00	5.875	5.875
2.	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.500	1.500	2.000	2.000	1.500	1.470	1.500	2.000	2.000	1.499	-	100,00	100,00	100,00	100,00	5.875	5.875
3.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	1.794	1.762	2.000	1.958	1.134	-	100,00	100,00	100,00	100,00	5.875	5.875

No.	Program / Kegiatan	Target Anggaran Tahunan (000)					Realisasi Anggaran Tahunan (000)					Rasio Pendanaan Renstra Tahunan					Rasio Rata-rata Pertumbuhan Pendanaan (000)	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>																	
1.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	15.000	16.000	23.000	35.680	92.100	14.292	14.389	21.083	31.731	78.197	95,28	89,93	91,66	88,93	84,90	36.356	31.938
2.	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	5.000	5.000	5.000	7.000	8.000	5.000	3.839	3.738	6.367	5.780	100,00	76,78	74,76	90,95	72,25	6.000	4.945
3.	Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	8.000	8.000	12.000	12.618	10.000	7.915	7.869	9.802	10.293	9.260	98,94	98,36	81,68	81,57	92,60	10.124	9.028
4.	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	-	-	7.000	-	-	-	-	5.759	-	-	-	-	82,27	-	-	7.000	5.759
5.	Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	-	-	10.000	10.000	7.370	-	-	9.585	9.948	3.330	-	-	95,85	99,48	45,18	9.123	7.621
6.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan	-	-	10.000	10.000	10.240	-	-	9.513	8.612	9.040	-	-	95,13	86,12	88,28	10.080	9.055
7.	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	-	-	10.000	10.000	7.670	-	-	8.675	8.673	5.094	-	-	86,75	86,73	66,42	9.223	7.481
8.	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	-	-	10.000	10.000	7.980	-	-	7.592	9.994	6.795	-	-	75,92	99,94	85,15	9.327	8.127
9.	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	-	-	-	63.461	190.000	-	-	-	63.424	175.799	-	-	-	99,94	92,53	126.731	119.611
10.	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	25.000	25.000	95.415	83.050	70.000	24.875	25.000	94.391	81.309	67.974	99,50	100,00	98,93	97,90	97,11	59.693	58.710
11.	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	20.000	20.000	20.000	201.000	147.020	17.975	19.639	18.896	190.887	142.995	89,88	98,20	94,48	94,97	97,26	81.604	78.078
12.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	17.740	20.000	30.000	552.000	54.400	17.390	20.000	28.646	506.457	48.669	98,03	100,00	95,49	91,75	89,47	134.828	124.232
13.	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	-	-	-	-	49.500	-	-	-	-	6.630	-	-	-	-	13,39	49.500	6.630
14.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	40.000	-	20.000	48.320	43.000	38.007	-	19.825	43.780	36.708	95,02	-	99,13	90,60	85,37	37.830	34.580
15.	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif sumber pangan alternatif	37.000	65.000	44.000	45.000	18.760	34.926	56.583	38.059	41.528	16.880	94,39	87,05	86,50	92,28	89,98	41.952	37.595
16.	Penyelenggaraan DAK Bidang Pertanian	-	-	-	-	1.070.532	-	-	-	-	965.903	-	-	-	-	90,23	1.070.532	965.903

No.	Program / Kegiatan	Target Anggaran Tahunan (000)					Realisasi Anggaran Tahunan (000)					Rasio Pendanaan Renstra Tahunan					Rasio Rata-rata Pertumbuhan Pendanaan (000)	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah</b>																	
1.	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	68.000	65.000	84.800	125.000	131.390	65.448	57.520	74.588	118.871	110.107	96,25	88,49	87,96	95,10	83,80	94.838	85.307



## **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **1. Tantangan**

- a. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2008 – 2013 luasannya cukup besar yaitu 263 hektar atau sekitar 52 hektar setiap tahunnya, dalam jangka panjang tentu akan semakin besar luasannya sehingga akan berpengaruh negatif pada ketersediaan pangan daerah, sehingga perlu regulasi yang mengatur kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Terdapat beberapa desa rawan pangan terutama rawan pangan kronis baik yang disebabkan oleh ketidakmampuan secara ekonomi maupun karena gizi buruk akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan, menjadikan ketahanan pangan sangat rentan;
- c. Dari sisi konsumsi pangan, tidak mudah mengubah pemahaman dan pola konsumsi pangan masyarakat menuju ke arah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman dengan berbagai faktor yang mempengaruhi. Adanya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok beras, belum terlihat respon masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan pangan alternatif. Sehingga perlu upaya yang intensif dan berkesinambungan dalam pembinaan untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran dan pemahaman pada seluruh lapisan masyarakat.
- d. Perilaku produsen pangan segar dan olahan belum menjamin mutu dan keamanan pangan (food safety). Masih ditemui residu pestisida pada pangan segar dan bahan tambahan pangan yang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi pada pangan olahan.

### **2. Peluang**

- a. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat mendukung keberhasilan pembangunan ketahanan pangan:
- b. Adanya dukungan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat

baik dukungan kebijakan maupun pendanaan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan ketahanan pangan.

- c. Potensi lahan sawah yang sebagian besar beririgasi teknis dengan potensi produksi tinggi memberikan kontribusi yang besar terhadap terjaminnya ketersediaan pangan di Kabupaten Sukoharjo.
- d. Kabupaten Sukoharjo memiliki lahan pekarangan yang cukup luas di perdesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- e. Terjalannya koordinasi antar pemangku kepentingan yang terkait dalam menentukan kebijakan guna mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan ketahanan pangan dalam wadah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

## BAB III

### ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling utama bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Permasalahan ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain: kontinuitas pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, keterjangkauan masyarakat atas pangan, pola konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, efisiensi rantai pemasaran atau distribusi pangan, dan berkembangnya kelembagaan pangan dan gizi, serta adanya kerawanan pangan terutama rawan pangan transien dan rawan pangan kronis.

Upaya peningkatan ketersediaan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi perlu dilakukan terutama dalam kaitannya dengan distribusi komoditas pangan strategis pada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo yang mencapai ± 889.966 jiwa dan akan terus mengalami kenaikan setiap tahun, berpotensi menimbulkan permasalahan terkait dengan penyediaan pangan, walaupun produksi pertanian setiap tahun mengalami kenaikan tetapi tidak menutup kemungkinan kenaikan produksi tersebut tidak berimbang dengan kenaikan jumlah penduduk. Karena lahan pertanian yang semakin berkurang dan sarana produksi benih mempunyai batas potensi produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk cukup tinggi.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan perlu diimbangi dengan pemenuhan persyaratan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Selama ini pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih kurang, disamping faktor daya beli. Hal ini tercermin dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum ideal. Skor PPH di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016 sebesar 91,8. Skor Ideal adalah 100.

Permasalahan yang tidak kalah penting dalam peningkatan ketahanan pangan yaitu kondisi rawan pangan, baik rawan pangan transien maupun rawan pangan kronis, terutama rawan pangan kronis yang ada di desa rawan pangan. Sampai dengan akhir tahun 2015, desa rawan pangan yang belum mendapatkan pemberdayaan bansos desa mandiri pangan sebanyak 35 desa atau  $\pm 20\%$  dari jumlah desa yang ada. Masyarakat rawan pangan kronis tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan minimal bagi rumah tangganya secara terstruktur dan terus-menerus.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting dan perlu mendapat perhatian adalah fluktuasi harga pangan pokok strategis pada saat panen raya dan menjelang hari-hari besar keagamaan nasional. Jatuhnya harga pangan saat panen raya dan kenaikan yang signifikan menjelang hari-hari besar keagamaan perlu upaya penanganan jika memungkinkan antisipasi agar tidak terlalu berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan ketahanan pangan perlu perumusan kebijakan melalui koordinasi antar instansi terkait pemangku kepentingan yang menangani masalah pangan dan gizi. Kurang efektifnya koordinasi lintas sektoral dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan menyebabkan program-program yang kurang sinergis antar instansi yang berkaitan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Dewan Ketahanan Pangan yang beranggotakan dinas/instansi terkait yang merupakan wadah koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan kurang dimanfaatkan secara optimal.

## **B. Telaah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati**

### **1. VISI Bupati dan Wakil Bupati**

Visi dan Misi Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016 – 2021. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukoharjo 2016-2021 dirumuskan Sebagai berikut:

**VISI :**

**“TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU,  
DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**SEJAHTERA:**

Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar

**MAJU :**

Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, ber peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;

**BERMARTABAT :**

Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat;

## **PROFESIONAL :**

Mengandung Makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntabel, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

## **2. MISI Bupati dan Wakil Bupati**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sukoharjo 2016-2021 tersebut, maka dijabarkan dalam 5 (lima) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut , yaitu :

### **a. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan.**

- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.
- Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

### **b. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.**

- Meningkatkan kualitas layanan publik;
- Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat;
- Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik.

### **c. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah**

- Mewujudkan Ketahanan Pangan
- Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
- Mewujudkan Penguatan Iklim Investasi;
- Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.



**d. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.**

- Mewujudkan fasilitasi Kerukunan Kehidupan Beragama
- Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal.

**e. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis**

- Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

**3. Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut:

**1) Misi I :**

**Tujuan :**

- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan sasaran :
  - (1) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan;
  - (2) Meningkatnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya;
  - (3) Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan dan politik yang kondusif.
- b) Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik, dengan sasaran :
  - (1) Melaksanakan Keterbukaan Publik;
  - (2) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik, dan memanfaatkannya
  - (3) Meningkatkan Peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan

## **2) MISI II :**

### **Tujuan :**

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran :
  - (1) Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana
  - (2) Terwujudnya pendidikan untuk semua
  - (3) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
- b) Mengurangi Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat dengan sasaran :
  - (1) Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif,
  - (2) Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin
  - (3) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
  - (4) Meningkatnya Kesempatan Kerja
- c) Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik dengan sasaran :
  - (1) Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah
  - (2) Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk;
  - (3) Terwujudnya Peningkatan Akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan).

## **3) MISI III :**

### **Tujuan :**

- a) Mewujudkan ketahanan pangan, dengan sasaran :
  - (1) Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan;
  - (2) Terwujudnya kualitas Konsumsi Pangan;

- (3) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;
- (4) Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan
- b) Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, dengan sasaran :
  - (1) Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup
  - (2) Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana
- c) Mewujudkan Penguatan Investasi, dengan sasaran :
  - (1) menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing
  - (2) mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil
- d) Peningkatan daya saing, dengan sasaran ;
  - (1) Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing;
- e) Mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran :
  - (1) Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan;
  - (2) Peningkatan peran UMKM dan Koperasi;
  - (3) Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan;
- f) Mewujudkan penguatan pembangunan infrastruktur, dengan sasaran :
  - (1) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi;

#### **4) MISI IV :**

##### **Tujuan :**

- a) Meningkatkan kerukunan umat beragama, dengan sasaran :
  - (1) Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan
  - (2) Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama

- b) Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal, dengan sasaran:
  - (1) Terwujudnya peningkatan aktifitas sanggar seni dan budaya daerah
  - (2) Terwujudnya peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah
  - (3) Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

**5) MISI V :**

**Tujuan :**

- a) Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran :
  - (1) Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya bagi para penegak hukum
  - (2) Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.

b. Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misi sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Misi, Tujuan dan Sasaran**

**VISI :Terus membangun Sukoharjo Yang Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat**

**Didukung Pemerintahan Yang Profesional**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan</b>	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Lembaga minim struktur kaya fungsi	Peningkatan kualitas manajemen kinerja pembangunan
		Meningkatnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya	Peningkatan kualitas aparatur dan kesesuaian dengan bidang keahlian	Penguatan reformasi birokrasi
		Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif	pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan daerah	pengambilan kebijakan publik Partisipatif
	Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah	Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi kinerja pembangunan	Menuju <i>e-goverment</i>
		Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik, dan memanfaatkannya	mengaktifkan PD untuk melaksanakan keterbukaan informasi kinerja	Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan secara terbuka	Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan
<b>2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Peningkatan aksesibilitas dan peran aktif untuk pencapaian kualitas keluarga	Meningkatkan kesadaran akan kualitas keluarga berencana
		Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas yang berkarakter	mengoptimalkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan pendidikan
		Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Peningkatan jumlah fasilitas dan jenis layanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
	Mengurangi Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat	Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif	Intervensi langsung kepada PMKS	meningkatkan kesadaran tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
		Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin	Melaksanakan intervensi langsung terhadap kebutuhan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat miskin	Memberikan kesempatan untuk perubahan kondisi kesejahteraan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan kapasitas perempuan	Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak
		Meningkatnya kesempatan kerja	Pemberian pelatihan yang cepat dan tersertifikasi	Peningkatan kualitas Sumber Daya Menuasia sesuai kebutuhan pasar
	Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik	Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Pemerataan pembangunan pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perumahan
		Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk	Penyediaan air minum secara komunal	Peningkatan kuantitas air minum dengan akses umum
		Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)	Peningkatan pengelolaan sanitasi dan persampahan	Peningkatan tata kelola lingkungan pemukiman
<b>3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan</b>	Meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan	Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan Pangan	Peningkatan produksi dan produktifitas	Pola Intensifikasi



<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Sektor Unggulan Daerah</b>		Terwujudnya kualitas Konsumsi pangan	Menjaga ketersediaan bahan utama pangan yang terjangkau	Mengoptimalkan stabilitas ketahanan pangan daerah
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	meningkatkan ketersediaan pada level kelompok tani	Mempermudah akses pada sarana prasana penunjang pertanian
		Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan	Intervensi langsung dalam proses di baik pra maupun pasca panen	Memberikan tingkat keuntungan yang optimal
	Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengurangi penurunan kualitas lingkungan hidup	Mengembangkan tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
		Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana	Meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana	Meningkatkan mitigasi dan tata kelola bencana
	Peningkatan Daya Saing	Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan informasi investasi	Memberikan kemudahan dan kepastian kepada investor dalam investasi

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	Mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Pertumbuhan Industri Pengolahan	Meningkatkan kinerja industri baik dalam kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan	peningkatan kualitas industri dan pengembangan industri kreatif
		Peningkatan peran UMKM dan Koperasi	Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan Koperasi dan UMKM serta akses permodalan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM
		Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Peningkatan kualitas tradisional dengan standar tinggi	menciptakan akses yang berkualitas antara penjual dan pembeli
	Mewujudkan penguatan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi	peningkatan kualitas dan kuantitas pada jalur utama dan penghubung strategis	meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur
<b>4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.</b>	meningkatkan kerukunan umat beragama	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Peningkatan kualitas sarpras ibadah melalui stimulan keswadayaan masyarakat	Peningkatan kualitas sarpras ibadah
		Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama	Komunikasi antar umat beragama dan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan	Peningkatan kualitas hubungan antar umat beragama
	Mewujudkan Pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal	Tersedianya sarana seni dan budaya	Inventarisasi benda, situs, kawasan budaya yang dilestarikan	Meningkatkan kuantitas sarana seni dan budaya

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Terwujudnya peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah	Optimalisasi ruang publik untuk seni dan budaya; Pengembangan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur sosial dan budaya	Meningkatkan akses pelaksanaan pertunjukkan seni dan budaya di masyarakat
		Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas kelembagaan pemuda dalam rangka menuju kemandirian; Meningkatkan kualitas Sumber Daya dalam bidang keolahragaan	Meningkatkan kualitas pemuda dalam pelaksanaan pembangunan
<b>5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tenram , Aman dan Dinamis</b>	Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya para penegak hukum	Meningkatkan komunikasi diantara seluruh stakeholder; Mempercepat penyelesaian permasalahan dalam koridor kebijakan lokal dan hukum secara komprehensif	Menciptakan situasi yang kondusif diantara para penegak hukum dan masyarakat
		Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat	Optimalisasi kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam rangka penciptaan sinergitas dan peningkatan kualitas pembangunan daerah	meningkatkan peranserta akademisi, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah

#### 4. Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Program prioritas merupakan program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan disamping program-program pendukung lainnya, untuk mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021. Program prioritas Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo periode Renstra 2016 – 2021 selaras dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

## Matrik Program Prioritas Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Data Capaian Tahun 2016	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		Kondisi Kinerja	
				URAIAN	SATUAN		TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)
Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Tingkat Keragaman Konsumsi Pangan	%	77,50	78,80	286.414	81,25	265.357	83,75	284.584	86,25	268.104	87,75	525.632	87,75	1.630.091
				Persentase Ketersediaan pangan utama	%	259	192	730.000	193	830.000	196	850.000	198	1.320.000	200	1.550.000	200	5.280.000
				Persentase keamanan pangan	%	90,00	85,81	80.000	85,86	80.000	85,91	90.000	85,96	90.000	86	100.000	86	440.000
				Persentase kestabilan harga pangan pokok strategis	%	84,99	85	254.500	86	265.000	87	275.000	88	287.500	89	295.000	89	1.377.000
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	%	3,30	143.000	3,30	145.000	3,3	145.000	3,30	145.000	3,30	146.000	3,30	175.000	20



## C. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Perangkat Provinsi Jawa Tengah

### 1. Renstra Kementerian/Lembaga

Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional periode 2015 - 2019, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai Visi sebagai berikut :

**“Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”**

Sedangkan Misi Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal;
- b. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
- c. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
- d. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- e. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
<b>Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganeekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan</b>	Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal	Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam
	Memantapkan penanganan kerawanan pangan	Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan
	Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok	Memperkuat system distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok	Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen
	Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal	Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman
		Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)
	Mewujudkan keamanan pangan segar	Meningkatkan keamanan pangan segar	Tercapainya keamanan pangan segar

Sumber Data : Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019

2. Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2013 - 2018



Dalam rangka mendukung program-program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

#### **VISI**

**"Menjadi Lembaga yang Handal dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Jawa Tengah"**

#### **MISI**

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Ketahanan Pangan telah merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.
- b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.
- c. Meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan.

Adapun Tujuan dan sasaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah  
Periode Tahun 2013 - 2018

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
<b>Menjadi Lembaga yang Handal dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Jawa Tengah</b>	<b>Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan</b>	Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.	Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan
		Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga	Tercapainya ketersediaan pangan utama
		Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/ bencana	Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
		Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah
		Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.	Tercapainya penanganan daerah rawan pangan
	<b>Meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan</b>	Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat
		Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan	Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan

Sumber data : Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

#### D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berisikan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik yang bersifat internal maupun eksternal wilayah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di suatu wilayah kabupaten. Kondisi pemanfaatan dan pengelolaan dari rencana tersebut, bisa mengalami berbagai kemungkinan perubahan kondisi-kondisi yang menyangkut faktor internal dan eksternal wilayah, serta kekurangsesuaian penggunaan rencana dan pengendalian sehingga terjadi penyimpangan.

Penyusunan RTRW Kabupaten Sukoharjo adalah suatu upaya penataan ruang yang lebih terpadu untuk memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang sekaligus merupakan wadah

bagi rencana sektoral yang dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya penataan ruang ini nantinya diharapkan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo akan lebih terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas masyarakat di Kabupaten Sukoharjo juga mengalami perubahan. Rencana pembangunan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dilakukan di Kabupaten Sukoharjo.

Keterkaitan RTRW dengan ketahanan pangan adalah adanya perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan produktif. Di dalamnya tercantum perencanaan yang salah satunya adalah untuk kawasan budidaya, termasuk di dalamnya untuk lahan pertanian pangan.

Berdasarkan kenyataan bahwa luas lahan persawahan di Kabupaten Sukoharjo setiap tahun mengalami penyusutan. Pada umumnya, lahan sawah yang hilang dikonversi menjadi lahan permukiman dan industri. Pengalihan fungsi lahan persawahan tidak diiringi dengan pembukaan lahan pertanian baru. Akibatnya, lahan persawahan otomatis terus berkurang. Berkurangnya lahan sawah ini mengakibatkan berkurangnya produksi padi yang mengancam ketahanan pangan.

Oleh karena itu, agar ketahanan pangan tetap terjaga, perlu ditetapkan kawasan yang harus terus dipertahankan sebagai lahan sawah berkelanjutan atau sawah utama dan hanya boleh dikonservasi dengan kompensasi yang berat. Untuk tujuan tersebut telah tersedia metode penggolongan lahan sawah yang didasarkan pada kriteria biofisik dengan tiga parameter yaitu status irigasi, intensitas tanam (IP-Padi) dan tingkat produktivitas, yang semuanya terakomodir di dalam RTRW. Luas lahan pertanian yang harus dipertahankan (Kawasan pertanian pangan berkelanjutan) di Kabupaten Sukoharjo dilindungi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.

## **E. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu ketahanan pangan merupakan isu strategis yang sangat penting mengingat Indonesia sebagai Negara agraris yang mempunyai potensi pangan yang sangat besar. Pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJPN 2005 – 2025, Pemerintah bertumpu pada kemandirian pangan yang diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal.

Isu ketahanan pangan mencakup produksi pangan, ketersediaan meliputi Jumlah, mutu dan keterjangkauan baik fisik maupun ekonomi, keamanan pangan terutama pangan segar tanpa mengesampingkan pangan olahan serta, ketahanan pangan berbasis potensi lokal serta stabilisasi harga pangan. Konsep ketahanan pangan tersebut belum cukup harus dikaitkan dengan isu kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak rakyat sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan sendiri kebijakan dan strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal, dengan tetap memperhatikan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan serta dukungan terutama untuk mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin yang rawan pangan.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. VISI DAN MISI DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO 2016 – 2021**

Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016 – 2021. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 – 2021 dirumuskan sebagai berikut:

#### **VISI :**

**“TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### **SEJAHTERA:**

Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar

#### **MAJU :**

Mengandung Makna Kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;

**BERMARTABAT :**

Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat;

**PROFESIONAL :**

Mengandung Makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntable, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sukoharjo 2016-2021 tersebut, maka dijabarkan dalam 5 (lima) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Misi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo adalah misi ke-3, yaitu :

**MISI**

**“Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah”** antara lain dengan

**“Mewujudkan Ketahanan Pangan”**

**B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016 – 2021**

1. Tujuan Dinas Pangan yang akan diwujudkan untuk 5 (lima) tahun ke depan yakni “Meningkatkan ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat”.
2. Sasaran Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021 adalah “Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas”. Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021.

Visi : TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2016	Kondisi 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2016	Kondisi 2021
<b>4. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah</b>	Meningkatkan ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat	1. Tingkat Ketersediaan Pangan	190 %	200%	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	1. Ketersediaan Energi (KKal/Kapita/Hari)	3.991	3.650
		2. Tingkat Konsumsi Pangan (kalori)	93,09 %	100 %		2. Konsumsi Energi (KKal/Kapita/Hari)	2.048	2.150
						3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (%)	98,27 %	99,05%
						4. Angka Konsumsi Protein (Gr/Kap/Hari)	52	57

### **C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO 2016 – 2021**

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang menurut misi sebagai berikut :



Tabel 4.2  
**Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**VISI :Terus membangun Sukoharjo Yang Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat**

**Didukung Pemerintahan Yang Profesional**

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah</b>			
1.	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	1. Menjaga ketersediaan bahan utama pangan yang terjangkau  2. Penanganan keamanan pangan terutama panga segar  3. Meningkatkan Stok pangan masyarakat  4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	a. Pemantauan ketersediaan pangan lintas sektoral baik menjelang hari besar keagamaan nasional maupun secara berkala  Pengawasan mutu dan keamanan pangan lintas sektoral terutama pangan segar  a. Pengembangan cadangan pangan kelompok masyarakat (gapoktan) b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk menangani kondisi rawan pangan c. Pengembangan cadangan pangan hidup melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan d. Pemberdayaan Masyarakat rawan pangan  Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui Pemanfaatan Pekarangan dan diversifikasi produk pangan olahan serta melalui pameran/ekspo

**D. KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RENSTA DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO 2016 - 2021**

**Tabel 4.3**  
**Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Kondisi 2016	Target tahunan					Capaian Akhir Renstra
			Indikator	Satuan		2017	2018	2019	2020	2021	
Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	1. Tingkat Ketersediaan Pangan	%	190	192	193	196	198	200	200
			2. Tingkat Konsumsi Pangan (kalori)	%	93,09	94	95,91	96,86	98,77	100	100
			1. Ketersediaan Energi (kalori)	Kkal/Kap/Hari	3.991	2.904	2926	2.948	3.560	3.650	3.650
			2. Konsumsi Energi (kalori)	Kkal/Kap/Hari	2.048	2.068	2.110	2.131	2.143	2.150	2.150
			3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	98,27	94,27	94,50	95,74	99,00	99,05	99,05
			4. Angka Konsumsi Protein	Gr/Kap/Hari	53,9	53	54	55	56,9	57	57

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Langkah-langkah operasional sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, termasuk keberlanjutan implementasi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih relevan, dituangkan dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai sasaran, tujuan dan misi organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang dapat digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcomes, benefit maupun impact.

Program-program pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan meliputi program umum (rutin) yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, dan program-program yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo.

#### **A. Program Umum**

#### **B. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

- C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
    Sasaran Program : Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur penunjang kinerja
- D. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
    Sasaran Program : Meningkatnya disiplin aparatur
- E. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  
    Sasaran Program : Meningkatnya SDM berkualitas
- F. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
    Sasaran Program : Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan
- G. Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  
    Sasaran Program : Terwujudnya Perencanaan Perangkat Daerah Berbasis Kinerja

Adapun program-program tersebut secara rinci sebagai berikut :

Tabel 5.1

Rencana Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif dan Kinerja Tahunan dengan Target Akhir Renstra Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Satuan	Target Renstra Tahunan (,000,-)												Kondisi Akhir Renstra
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.21-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran		bulan	100	207.202	100	230.702	100	221.050	100	254.390	100	308.200	100	333.000	100
1.21-1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan jumlah surat keluar	Administrasi perkantoran	surat	1863	5.300	1852	4.500	1756	4.000	1852	4.000	1876	6.000	1885	7.000	11084
1.21-1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	Biaya telepon, air, listrik	Rekening	36	25.800	36	38.160	36	31.050	36	39.000	36	40.200	36	45.000	216
1.21-1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah aparatur internal OPD yang dilayani	Pengelola administrasi keuangan	orang	23	73.740	21	76.740	21	83.000	23	78.740	25	87.000	25	90.000	25
1.21-1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Alat tulis kantor	Jenis	83	20.000	72	20.000	79	12.000	67	17.000	70	20.000	73	25.000	73
1.21-1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak/digandakan	Barang cetakan, penggandaan, jilid	lembar	28320	11.000	36348	10.562	31520	9.000	17725	9.000	17902	13.000	17991	15.000	149806
1.21-1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	Instalasi listrik	Jenis	9	1.660	7	2.000	7	3.000	7	3.000	7	3.000	7	10.000	9
1.21-1.14	Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	Tenaga Harian Lepas dan alat kebersihan	m2	875	66.840	875	75.380	875	76.000	875	100.290	875	135.000	875	135.000	875
1.21-1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bacaan dinas yang disediakan	Bahan bacaan	Jenis	2	2.862	2	3.360	2	3.000	2	3.360	2	4.000	2	6.000	2

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Satuan	Target Renstra Tahunan (,000,-)											Kondisi Akhir Renstra	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1.21-1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Makanan dan minuman	doos	625	25.000	718	28.720	775	31.000	718	28.720	721	33.700	724	36.000	4281
1.21-1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar dan ke dalam daerah yang dilakukan	Perjalanan dinas luar daerah	kali	70	63.858	53	69.872	48	65.640	79	90.000	82	120.000	85	120.000	417
1.21-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja		%	78	198.450	80	209.605	82	387.200	85	153.100	87	670.000	90	490.000	90
1.21-2.3	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Gedung kantor	gedung	-	-	0	0	1	15.000	0	0	0	0	0	0	1
1.21-2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kendaraan dinas	unit	-	-	0	0	1	203.200	0	0	2	510.000	1	255.000	4
1.21-2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Peralatan gedung kantor	jenis	7	80.450	7	47.625	2	15.000	3	6.100	0	0	3	65.000	9
1.21-2.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang disediakankecil.	Mebeleur kantor	jenis	-	-	3	24.980	2	7.000	0	0	0	0	0	0	5
1.21-2.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Gedung kantor	gedung	1	3.000	3	7.000	3	7.000	3	7.000	3	10.000	3	20.000	3
1.21-2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	Kendaraan dinas	unit	16	115.000	16	130.000	16	140.000	16	140.000	16	150.000	16	150.000	16

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Satuan	Target Renstra Tahunan (.000.-)												Kondisi Akhir Renstra	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.21-2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Perlengkapan gedung kantor	jenis	4	10.106.000	4	12.300	4	10.000	4	10.000	4	15.000	4	15.000	4	
1.21-2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang direhabilitasi	Gedung kantor	gedung	1	150.000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.21-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase rata-rata kehadiran pegawai		%	90	5.640	90	4.935	90	7.763	90	7.425	90	8.750	90	18.750	90	
1.21-3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	Aparatur dinas	stel	24	5.640	21	4.935	23	7.763	23	7.425	25	8.750	25	10.000	141	
1.21-3.5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Aparatur dinas	stel	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	25	8.750	25	
1.21-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi		%	100	22.508	100	63.351	100	46.250	100	38.000	100	40.000	100	40.000	100	
1.21-5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Aparatur dinas	orang	-	-	21	45.000	21	25.250	23	23.000	25	25.000	25	25.000	25	
1.21-5.4	Study Banding	Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti Study Banding	Aparatur dinas	orang	1	12.000	1	12.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	6	
1.21-5.5	Seminar/ Lokakarya	Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti seminar/lokakarya	Aparatur dinas	orang	1	10.508	2	6.351	2	6.000	0	0	0	0	0	0	5	
1.21-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah		%	93	5.660	94	6.000	95	5.015.000	96	11.500	97	13.500	98	13.500	98	
		Nilai SAKIP OPD		poin					56,50		56,75		68,95		69,35		69,35	
1.21-6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	laporan	3	2.660	3	3.000	3	5.000.000	3	5.000	3	5.000	3	5.000	18	
1.21-6.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Laporan Semester I dan II	laporan	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.21-6.3	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang lengkap	Laporan Prognosis Realisasi	laporan	2	1.500	2	1.500	2	5.000	2	3.500	2	3.500	2	3.500	12	

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Satuan	Target Renstra Tahunan (.000,-)												Kondisi Akhir Renstra
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.21-2.26	Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan dalam Renja yang terakomodir dalam DPA	Perlengkapan gedung kantor	jenis	75	8.300	78	11.500	80	25.000	83	24.620	85	25.000	88	26.500	88
1.21-2.42	Penyelenggaraan Forum SKPD	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Gedung kantor	kali	1	5.000	-	7.000	0	15.000	0	14620	0	15000	0	16.500	6
1.21-3.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Aparatur dinas	dokumen	24	3.300	21	4.500	23	10.000	23	10.000	25	10.000	25	10.000	30





#### **H. Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**

Program pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo meliputi :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

Sasaran Program : Meningkatnya ketersediaan pangan dan kualitas konsumsi pangan

2. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah

Sasaran Program : Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan

Program-Program tersebut secara rinci sebagai berikut :



Tabel 5.2  
Rencana Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif dan Kinerja Tahunan dengan Target Akhir  
Renstra Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Renstra Tahunan (.000,-)										Kondisi Akhir Renstra
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.21-15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	1. Tingkat keragaman konsumsi pangan		%	77,5	78	78,8	286.414	81,25	265.357	83,75	284.584	86,25	268.104	87,75	525.632	87,75
		2. Persentase Ketersediaan Pangan Utama Yang Terjangkau		%	190	452.000	192	730.000	193	830.000	196	850.000	198	1.320.000	200	1.550.000	200
		3. Persentase Keamanan Pangan		%	85,76	60.000	85,81	80.000	85,86	80.000	85,91	90.000	85,96	90.000	86	100.000	86
		4. Persentase kestabilan harga pangan pokok strategis		%	84,99	37.000	85	254.500	86	265.000	87	275.000	88	287.500	89	295.000	89
1.21-15.1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah event pelaksanaan kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Daerah rawan pangan, raperda, rakor, data rawan pangan	event	2	154.845	2	40.000	2	6.000	2	10.500	2	52.245	2	57.000	12
1.21-15.2	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan	Jenis laporan ketahanan pangan yang disusun	Database ketahanan pangan	laporan	2	10.000	2	15.000	2	10.000	2	13.500	2	50.000	2	55.000	2
1.21-15.3	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Jumlah lokasi yang disurvei 27 lokasi per tahun	Pola konsumsi pangan masyarakat	lokasi	27	11.300	27	13.300	27	5.000	27	10.000	27	12.200	27	17.000	27
1.21-15.5	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Dewan ketahanan Pangan yang disusun	Anggota Dewan Ketahanan Pangan	laporan	2	80.000	2	80.000	2	38.344	2	23.500	2	69.271	2	75.700	12
1.21-15.6	Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	Jumlah lokasi Pengumpulan data distribusi (rantai pasokan) dan pemasaran pangan 12 lokasi	Pelaku distribusi dan pemasaran pangan	lokasi	-	-	0	0	0	0	0	0	4	20.000	4	22.000	4
1.21-15.9	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah event pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Kawasan Rumah Pangan Lestari (bantuan benih, lomba KRPL, KWT, dll)	event	4	100.673	2	50.645	2	33.000	3	25.000	3	37.490	3	41.000	4

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Renstra Tahunan (.000,-)										Kondisi Akhir Renstra	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.21-15.10	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Jumlah lokasi yang dipantau akses pangan masyarakatnya	Indikator akses pangan di 12 kecamatan	lokasi	12	10.000	12	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
1.21-15.11	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Frekuensi pemantauan harga dan pasokan pangan strategis	Pedagang bahan pokok, pasar kec., rice mill.	minggu	52	27.000	52	35.000	0	0	0	0	52	30.000	52	50.000	208	
1.21-15.12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah event pelaksanaan kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Kelompok masyarakat, kelompok wanita tani/kelompok tani	event	5	105.297	2	105.032	2	78.000	4	61.000	3	93.250	3	102.000	5	
1.21-15.13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah event pelaksanaan kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan daerah	Gapoktan LDPM, Pra LDPM, TTI	event	1	86.410	2	110.900	1	13.000	1	15.041	1	70.000	1	75.000	2	
1.21-15.14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah event pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Desa Rawan Pangan	event	1	25.000	1	31.350	1	30.000	2	33.000	2	150.000	2	112.500	2	

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Renstra Tahunan (.000,-)										Kondisi Akhir Renstra	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.21-15.18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina	Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat	lumbung	10	10.000	10	20.000	14	10.000	14	20.000	16	65.000	16	65.000	19	16
1.21-15.19	Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	Jumlah gapoktan LUPM yang difasilitasi	Gapoktan LUPM	Gapoktan	-	-	0	0	0	0	0	0	2	200.000	3	310.000	5	5
1.21-15.22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah event pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Masyarakat/ kelp. Tani/ pengelola warung sekolah	event	1	60.000	1	70.000	1	10.000	2	20.000	3	79.804	3	83.000	3	3
1.21-15.35	Penyelenggaraan DAK Bidang Pertanian	Jumlah lumbung pangan masyarakat/sarana prasarana pendukung ketahanan pangan yang dibangun/ difasilitasi	Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat	lumbung/unit	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21-15.37	Primatani untuk pengembangan pangan	Jumlah KWT Pemanfaatan Pekarangan yang terfasilitasi	Kelompok wanita tani (bantuan benih, sayuran, buah dan bibit ternak kecil)	kelompok	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21-15.38	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Pengisian gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten	Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	ton	-	-	7,5	110.000	0	0	0	0	20	187.000	20	196.000	47,5	47,5
1.21-15.39	Penyediaan Infrastruktur Pangan	Jumlah event pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan	Data Infrastruktur Pangan	event	-	-	1	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.01-17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan		%	3,33	143.000	3,33	145.000	3,33	145.000	3,33	145.000	3,33	146.000	3,5	175.000	20	20
2.01-17.7	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah	Jumlah event promosi yang diikuti tingkat regional dan nasional	Produk lokal	kali	4	164.350	4	219.956	3	82.000	4	93.000	5	176.900	5	189.300	25	25

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
**2016 – 2021**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja perangkat daerah, masing-masing perangkat daerah menentukan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan tersebut. Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan yang akan dicapai selama periode RPJMD 2016 – 2021 terinci pada tabel berikut :

Tabel 6.1  
 Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo  
 Periode 2016 – 2021.

No	Nama Urusan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Awal Renstra 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir Renstra
1.	Pangan	Ketersediaan Energi	KKal/Kapita/ Hari	3.991	2904	2926	2948	3560	3650	3650
		Konsumsi Energi	KKal/Kapita/ Hari	2.048	2068	2110	2131	2141	2150	2150
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	98,27	94,27	94,50	95,74	99,00	99,05	99,05
		Angka Konsumsi Protein	Gr/Kapita /Hari	53,9	53	54	55	56,9	57	57

Ketersediaan energi mencerminkan ketersediaan pangan dari sisi kualitas bahan pangan. Dengan perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) dari berbagai jenis pangan yang tersedia, diketahui jumlah energi yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan energi per kapita dan Skor Pola Pangan Harapan



(PPH) Ketersediaan. Sedangkan Konsumsi Energi mencerminkan kualitas bahan pangan yang dikonsumsi penduduk yang menunjukkan jumlah energi yang dikonsumsi oleh penduduk per kapita per hari dalam Kilo Kalori. Demikian juga Angka Konsumsi Protein mencerminkan kualitas bahan pangan yang dikonsumsi penduduk, yang menunjukkan jumlah protein yang dikonsumsi penduduk per kapita per hari dalam gram. Ketersediaan energi dan protein dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : ketersediaan bahan pangan dan pertumbuhan penduduk. Ketersediaan bahan pangan dipengaruhi oleh produksi pangan dan distribusi pangan ke seluruh wilayah kabupaten serta keluar masuknya bahan pangan di Kabupaten Sukoharjo. Pada awal perencanaan yaitu tahun 2016 ketersediaan energi mencapai 3.991 KKal/Kapita/Hari, menunjukkan bahwa ketersediaan energi melampaui angka kecukupan energi ketersediaan 2.400 KKal/Kapita/Hari. Pada akhir periode Renstra tahun 2021 ditargetkan ketersediaan energi sebesar 3.650 KKal/Kapita/Hari dengan mempertimbangkan kenaikan jumlah penduduk setiap tahun. Angka konsumsi energi ditargetkan 2.150 KKal/Kapita/Hari, angka konsumsi protein ditargetkan 57 Gr/Kapita/Hari pada tahun 2021. Untuk Skor PPH Ketersediaan pada tahun 2016 sebesar 98,27 % dari Skor Ideal 100, dan ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 99,05 %.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 review ini merupakan revisi kedua dari Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021, revisi pertama pada tahun 2017 terkait dengan perubahan susunan perangkat daerah. Revisi kedua terkait rekomendasi Review Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020. Namun substansinya masih tetap merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi pedoman, penentu arah dan kebijakan dalam mencapai sasaran melalui rencana pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait yang berlaku, Revisi Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis ini akan menjadi pedoman dalam rangka pencapaian sasaran strategis melalui implementasi serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Disamping itu, Renstra juga merupakan salah satu acuan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan. Renstra menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama kurun waktu lima tahun. Dalam perjalanan pelaksanaannya, Renstra Dinas Pangan dapat direview, menyesuaikan kondisi seperti adanya perubahan peraturan-perundang-undangan, adanya perubahan kebijakan terkait tugas pokok dan fungsi, dan lain sebagainya.

Revisi Renstra ini tetap selaras dengan RPPJMD Kabupaten Sukoharjo periode 2016 – 2021, sinergi dan searah dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat selama lima tahun mendatang, dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, Oktober 2020

KEPALA DINAS PANGAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



**Ir. NETTY HARJANTI**  
Pembina Utama Muda

NIP. 196104081987012002

